

**TELECENTERS DAN EKSISTENSINYA**  
(Survei Eksistensi PLIK di Provinsi Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung)

**TELECENTERS AND EXISTENCE**  
(Survey of PLIK existence in Province Jambi, Bengkulu and Bangka Belitung)

**Felix Tawaang**

Peneliti Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta Badan Libang SDM Kemkominfo RI,  
Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat; 31922337

(Naskah diterima April 2015; diperiksa tim redaksi Agustus 2015; direvisi sesuai masukan tim redaksi September 2015; revisi ulang menurut catatan tim redaksi Oktober 2015; Diperiksa mitra bestari Oktober 2015; revisi menurut catatan mitra bestari Oktober 2015; revisi ulang menurut catatan mitra bestari November 2015; disetujui terbit November 2015)

**ABSTRACTS**

*This study questions the existence of telecentres in Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung. The study concludes that telecentres or PLIK indicates that telecentres generally do not operate accordance with its objectives. This phenomenon indicates that the implementation telecentres establishment for the first time in Velmdalen, Swedia- was not in realization. Operating-PLIK - according to theory of telecenters- generally is included into the category of basic model telecenters. Referring to the report of APJII, this phenomenon occurs also in the country of Chile (Latin America) and South Africa. Some PLIK such as the District Kepahiang and Curup change from the basic model of telecentres becomes a model of telephone cafe. A number of PLIK operating, according to the indicators of telecenters are excluded from category of ideal telecenters of ideal model, the one of Multi-purpose Community telecentres-MCT. Therefore, in addition to addressing the technical shortcomings earlier, it needs to improve the quality of the resource managers.*

**Key words: Telecenters ; PLIK; Existence; Telecentres Model; Province.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini pada dasarnya mempertanyakan eksistensi *telecenters* di Provinsi Bengkulu, Jambi serta Bangka Belitung. Hasil studi menyimpulkan bahwa *telecenters* yang dalam kenyataan disebut PLIK itu mengindikasikan bahwa *telecenters-telecenters* itu umumnya tidak beroperasi sesuai dengan tujuan pengadaan program *telecenters*. Dengan fenomena ini, maka hakekat dari pelaksanaan *Telecentres* sebagaimana pembentukannya pertama kali di Velmdalen, Swedia itu dengan sendirinya jadi tidak mungkin terwujud. Selanjutnya, terkait dengan PLIK-PLIK yang dijumpai masih eksis beroperasi, mengacu pada teori *telecenters*, maka PLIK-PLIK dimaksud umumnya termasuk dalam kategori *telecenters* yang berbasis model dasar. Mengacu pada catatan APJII, ini berarti fenomenanya sama dengan yang terjadi di negara-negara seperti Chili (Amerika Latin) dan Afrika Selatan, di mana *telecenters* model dasar juga memang banyak dijumpai di sana. Beberapa PLIK seperti di Kabupaten Kepahiang dan Curup, dijumpai PLIK yang berganti model, dari *telecenters* bermodel dasar menjadi model wartel. Dari sejumlah PLIK yang beroperasi tadi, sesuai dengan indikator *telecenters*, maka tidak satupun di antaranya yang termasuk kategori model ideal-*telecenters* model *Multi-purpose Community Telecentres-MCT*. Untuk itu, maka di samping mengatasi kekurangan-kekurangan teknis tadi, kiranya perlu juga meningkatkan kualitas sumber daya penegelolanya.

**Kata-kata kunci : Telecenters; PLIK, Eksistensi; Model Telecentres; Provinsi.**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sebagai bagian dari negara-negara yang ikut bergabung dalam WSIS, Indonesia terus berupaya untuk mengurangi lebarnya kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Upaya itu sendiri diantaranya dilakukan dengan cara menerapkan program-program *telecenters* atau *kiosks*. *Telecenters* or *kiosks* sendiri secara umum didefinisikan sebagai : *places or centers that provide shared public access to information and communications technologies for meeting the educational, social, personal, economic, and entertainment needs of the community* (Fuchs, 1998; Harris, 1999; Proenza, 2001, dalam Kumar dan Best, diakses 1 Oktober, 2015).

Di Indonesia sendiri, wujud penerapan program *telecenters* atau *kiosks* tadi diantaranya melalui program *Community Access Point (CAP)*. Program kemudian dilanjutkan dalam bentuk MPLIK dan Proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

Proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dimulai sejak Maret 2010 oleh Balai Penyedia, Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Proyek ini merupakan tindak lanjut terhadap pengembangan program desa berdering dan desa pintar. Dilaksanakan melalui penyediaan pusat layanan jasa akses internet kecamatan KPU/USO yang terdiri dari 11 (sebelas) Paket Pekerjaan. Prioritas utama yang menjadi target PLIK adalah perdesaan dengan status ibukota kecamatan (IKC) yang berjumlah 4.218 Kecamatan (sumber data BPS di olah berdasarkan Permen 145/2007 tentang WPUT).

Dalam pelaksanaannya, jumlah PLIK berubah menjadi 5.748. Hal ini terjadi dikarenakan: pertama, pemekaran wilayah pemerintah daerah yang berdampak kepada penambahan jumlah kecamatan; kedua, karakteristik wilayah pedesaan IKC dengan teritorial yang sangat luas, sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK, serta; ketiga, karakteristik pertumbuhan ekonomi dan industri serta tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi sehingga membutuhkan lebih dari 1 (satu) PLIK.

Pada awal rencananya, program ini berusaha menunjang program pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet hingga mencapai 50 juta pengguna, melibatkan 28.740 *personal computer client* atau komputer pengakses server yang dapat diselenggarakan secara terpusat. PLIK sendiri pengerjaannya terdiri atas beberapa tahapan.

Tahapan pertama adalah penyediaan perangkat PLIK yang dikerjakan tendernya pada Maret 2010 dengan empat perusahaan sebagai pemenang tender (<http://www.indotelko.com/2011/11/proyek-plik-kian-pelik>). Keempat perusahaan itu adalah Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta. Pemenang tender akan menyediakan akses jaringan internet untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia yang terbagi atas 11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama Rp 370,5 miliar atau sekitar Rp 1,4 triliun untuk jangka waktu lima tahun. (<http://inet.detik.com/read/2010/05/10/093722/1354208/328/internet-kecamatan-tak-lagi-bersengketa?id771108bcj>).

PLIK merupakan salah satu program Kewajiban Pelayanan Umum (*Universal Service Obligation*), yakni program pemerintah untuk penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi, untuk pemerataan layanan telekomunikasi sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki akses internet. Program ini juga merupakan perwujudan dari visi teknologi informasi dan komunikasi yang dicanangkan Kemenkominfo, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga 2025, dengan tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain, serta mengurangi daerah *blank spot* hingga mencapai 100 persen di wilayah Indonesia.

Berdasarkan data PLIK 2010, wilayah yang menerima program PLIK meliputi 32 provinsi dan provinsi Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung merupakan tiga saja diantaranya. Diprovinsi Jambi, dari sebanyak 128 kecamatan, terdapat 125 PLIK. Di Provinsi Bangka Belitung, dari sejumlah 40 kecamatan, maka PLIK-nya sebanyak 81 dan di Provinsi Bengkulu, dari sebanyak 110 kecamatan, maka jumlah PLIK-nya sebanyak 118.

Terkait dengan keberadaan PLIK di tiga provinsi tadi, data pre survai yang dilakukan BPPKI Jakarta beberapa tahun lalu memperlihatkan bahwa Kondisi Lapangan di Bengkulu : -Bengkulu Kota; Gading Cempaka; dari 5 PLIK yang diperiksa maka 4 PLIK-nya sudah tidak aktif dan hanya 1 yang aktif. Ini karena barang yg diterima tidak sesuai dokumen; tidak terima peralatan sama sekali. Sementara di Rejang Lebong, Bermani Ulu, yang dicari 5 PLIK dan yang ketemu 1 PLIK. Sedang di Kepahiang ada 6 PLIK dan 5 sudah tidak berfungsi dan hanya 1 yang berfungsi. Tidak berfungsi karena tidak ada jaringan; tidak ada teknisi untuk *maintenance*. Pertama-tama fisiknya ada, rata-rata setelah 2 bulan diambil kembali oleh suplier. Sementara di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa di Kota Jambi, ditemui ada 5 PLIK yang aktif dan tidak ada pengunjung-hanya aktif 1 bulan; Dua barang/perangkat sudah tidak ada karena dipindah ke kabupaten lain; Satu PLIK pindah alamat dan tidak diketahui alamatnya; Satu PLIK tidak ditemukan sesuai alamat. Di Batang hari, seharusnya ada tujuh PLIK dan dalam kenyataan ada satu yang aktif dan satu lagi tidak aktif karena peralatan sudah tidak lengkap. Lima lagi tidak jelas eksistensinya. Pihak Pemda juga tidak tahu mengenai perihal PLIK

dimaksud. Sedang di Provinsi Bangka Belitung temuan pre survai menunjukkan bahwa dari 5 PLIK yang dicari tapi hanya satu yang ditemukan. Dari yang ditemukan ternyata hanya beroperasi 1 bulan karena peralatannya rusak. Di kota Bangka, dari 5 PLIK yang dicari tapi hanya 1 yang ditemukan. Dari yang ditemukan ternyata hanya beroperasi 1 bulan karena peralatannya pada rusak.

Berdasarkan fenomena eksistensi *telecenters* atau *kiosks* yang wujudnya berupa PLIK yang masih relatif jauh dari harapan ideal tujuan pelaksanaannya, dalam hal ini terkait dengan fenomena kasus di tiga provinsi sebelumnya, penelitian ini akan menelaah lebih jauh menyangkut eksistensi *telecenters* dimaksud. Permasalahannya dirumuskan menjadi : Bagaimana eksistensi *telecenters* di Provinsi Bengkulu, Jambi serta Bangka Belitung ? Untuk kepentingan pelaksanaan, rumusan tersebut dirinci menjadi sbb. : 1) Bagaimana eksistensi lokasi dan kelengkapan *hardware* PLIK ?; 2) Bagaimana eksistensi kelengkapan *hardware* PLIK ? ;3) Bagaimana eksistensi pengelola/penyedia PLIK ? ; dan 4) Bagaimana eksistensi situasi pelayanan PLIK ?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi *telecenters* yang dalam hal ini kasusnya yaitu Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Wilayah Kerja BPPKI Jakarta. Dalam kaitan ini, pemenuhannya akan dilakukan melalui perolehan empat pengetahuan khusus yang nota bene menjadi jawaban spesifik dari empat permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang demikian tentunya diharapkan akan berguna bagi para pengambil kebijakan, khususnya menyangkut evaluasi pelaksanaan program PLIK oleh Direktorat Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### **Landasan Konseptual**

#### **Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari iklim monopoli menjadi kompetisi. Dengan munculnya regulasi tersebut tampaknya Penyelenggaraan telekomunikasi hanya terfokus pada daerah komersial, sedangkan daerah non komersial kurang diperhatikan, walaupun penyelenggara telekomunikasi masih memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah non komersial. Oleh karena itu, kewajiban pemberian kontribusi pelayanan universal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah non komersial, lebih tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, disimpulkan bahwa pelaksanaan KPU/USO tidak berjalan dengan optimal sehingga pemerintah berinisiatif dan terdorong untuk mengambil alih tanggung jawab kewajiban pelayanan KPU dalam bentuk kompensasi lainnya. Pemerintah melaksanakan pembangunan KPU/USO pada tahun 2003/2004 melalui APBN, yang selanjutnya untuk percepatan pembangunan nasional khususnya peningkatan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dipertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Melalui kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi disepakati besaran kontribusi KPU/USO sebesar 0,75% dari pendapatan kotor yang dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan KPU/USO yang dilakukan oleh Pemerintah, diperoleh rekomendasi bahwa skema pembangunan berbasis pengadaan barang masih kurang optimal. Berdasarkan DIPA Ditjen Postel Tahun Anggaran 2006, pembangunan KPU/USO bersumber dari kontribusi USO sesuai Surat Ijin Khusus Penggunaan Tahun 2006 Nomor 184/MK.02/2006 tanggal 2 Mei 2006 dan diklarifikasi kembali dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.2/ 2006 tanggal 5 September 2006.

Pemerintah mengubah skema pembangunan berbasis pengadaan barang menjadi skema penyediaan pelayanan universal berbasis pengadaan jasa berdasarkan hasil evaluasi pembangunan yang memberikan konsekuensi tidak dapat dilaksanakannya surat ijin khusus penggunaan PNBP tahun 2006; Konsekuensi reformasi kebijakan KPU/USO diantaranya adalah dengan menyusun Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO dan melakukan perubahan terhadap: Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor? 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak di Departemen Komunikasi dan Informatika (khususnya Pasal 4).

Dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai KPU/USO tersebut, ditemukan beberapa substansi yang bertentangan dengan beberapa substansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Departemen Keuangan; Sehubungan dengan hal tersebut, proses penerbitan Peraturan Pemerintah dimaksud dibatalkan dan pada tanggal 6 September 2006, Departemen Keuangan merekomendasikan pembentukan unit kerja yang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Ditjen Postel mengusulkan pembentukan Satuan Kerja Sementara yang menangani khusus penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU kepada Menteri Komunikasi dan Informatika; Usulan tersebut telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan Peraturan Nomor 32/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Penetapan satuan kerja; Pada tanggal 29 November 2006, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyetujui usulan pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan melalui Surat Persetujuan Nomor B/2735/M.PAN/11/2006.

Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 30 November 2006 telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 /PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan; Penetapan kode satuan kerja balai telekomunikasi perdesaan; Sesuai hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU Tahun 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-03/PB.6/2006 tanggal 5 Desember 2006, disimpulkan bahwa BTIP Depkominfo telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU; Berdasarkan Berita Acara tersebut, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BP3TI) Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 21 Desember 2006.

### **Eksistensi**

Kata eksistensi berasal dari bahasa latin *ex-sistere* ( *ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, *tampil* ) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. (<http://digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%20II.pdf>). Dalam konteks ini, secara filosofis filsuf bernama Karl Jaspers mengartikan eksistensi tadi menjadi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. Selain itu, Jaspers juga menjelaskan tentang penerangan eksistensi yang dikemukakannya, yaitu: 1) Eksistensi selalu memiliki hubungan dengan transedensi.; 2) Eksistensi merupakan filsafat yang menghayati dan menghidupi kebenaran; 3) Eksistensi seorang manusia dapat dibuktikan oleh cara berpikir dan tindakannya.

Karl Jaspers menerangkan hal-hal tersebut dengan tujuan supaya semua orang paham dan sadar bahwa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab, eksistensi merupakan sesuatu yang sifatnya individual sehingga bisa ditentukan oleh masing-masing individu. Dan menurut Jaspers, semua orang memiliki cara keberadaan yang khas dan unik, itulah yang dinamakan sebagai eksistensi seorang individu. Sehingga setiap orang yang dapat menentukan jati diri atas keberadaannya dan mampu berdiri di antara eksistensi orang lain maka mereka akan mendapatkan eksistensi yang sejati. (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/18/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu , menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *Exsistere* , yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi . Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya” (<http://digilib.unila.ac.id/4230/14 /BAB%20II.pdf>).

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. (hlm 14) (<http://digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%20II.pdf>).

Mengacu pada sejumlah literatur sebelumnya, maka dalam riset ini sendiri **eksistensi** dimaksudkan sebagai suatu keberadaan akan telecenters yang jadi objek penelitian. Dalam konteks tersebut maka aktualisasi akan telecenters dimaksud diekspresikan peneliti atas dasar pengaruh kehadiran atau ketidakhadirannya pada telecenters dimaksud.

### Telecenter

Telecenter memiliki banyak definisi, dan diantaranya dikemukakan oleh Reilly & Gomez (2001). Disebutkan, *telecentres are physical spaces that provide public access to information and communication technologies, notably the Internet, foreducational, bpersonal, social and economic development.* (Hedberg, 2015). Definisi lainnya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mayanja, Acevedo, Caicedo and Buré. (<https://en.wikibooks.org/> , accessed, 6 nov 2015). Menurut mereka *A Telecentre is a public place where people can access computers, the Internet, and other digital technologies that enable them to gather information, create, learn, and communicate with others while they develop essential digital skills.* Masih menurut mereka, setiap telecentre itu memiliki perbedaan. Fokus telecenters itu umumnya pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung komunitas, ekonomi, edukasi, dan pengembangan sosial-mengurangi keterisolasian-menjembatani kesenjangan digital-pem-promosian isu-isu kesehatan-dan penciptaan peluang-peluang ekonomis sebagai contoh.

Telecentres pertama sendiri didirikan di Velmdalen, Swedia pada awal hingga pertengahan 1980-an. Tidak lama kemudian, telecenter didirikan di Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Sejak saat itu, banyak telecenter, dalam berbagai format yang berbeda, telah membuka seluruh dunia. Beberapa alasan dimulainya kegiatan telecenters dimaksud yaitu : Untuk menanggapi kebutuhan telekomunikasi masyarakat ; untuk merespon kebutuhan pelatihan keterampilan/IT ; untuk menanggapi permintaan untuk akses Internet ; untuk menginspirasi pertumbuhan bisnis TI baru ; untuk menghasilkan peluang pendapatan ; untuk mengembangkan pasar untuk produk informasi dan layanan ; untuk menyediakan lokasi untuk *Telework /telecommuting* ; untuk memberikan lokasi untuk pengiriman terpusat pelayanan pemerintah; dan untuk mencapai segmen terlayani penduduk (Hedberg, 2015).

Meskipun telecentres hampir ada di setiap negara, namun demikian umumnya tampil dengan nama-nama yang berbeda. Ada yang menyebut : *public Internet access center (PIAP), village knowledge center, Infocenter, community technology center (CTC), community multimedia center (CMC), multipurpose community Telecentre (MCT), Common/Citizen Service Centre (CSC), school-based Telecentre, etc.* Di Indonesia sendiri telecenters dikenal melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Community Acces Point (CAP); Balai Informasi Masyarakat (BIM), Warung Informasi Teknologi (Warintek). Lalu dikenal juga dengan nama baru, seiring pengembangannya oleh pemerintah. Untuk pengembangan program telecenters terbaru itu , maka dikenal dengan istilah Pusat Layanan Internet Keamatan (PLIK) dan Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Layanan-layanan dan teknologi Telecenter pada hakekatnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu yang dilayaninya. Meskipun Telecenter bervariasi dalam hal layanan dan teknologi yang ditawarkannya, sebagian besar menyediakan akses kepada telepon, SMS, faks, komputer, dan Internet (termasuk e-mail dan Jaringan Jembar Jagad atau Web Dunia/www). *It is estimated that 40% of the world's population has less than US\$ 20 per year available to spend on ICT. In Brazil, the poorest 20% of the population counts with merely US\$9 per year to spend on ICT (US\$ 0.75 per month).<sup>161</sup> In Mexico, the poorest 20% of the society counts with an estimated US\$ 35 per year (US\$ 3 per month). For Latin America it is estimated that the borderline between ICT as a necessity good and ICT as a luxury good is roughly around the "magical number" of US\$10 per person per month, or US\$120 per year (<http://.wikipedia.org>).*

Berkaitan dengan variasi *telecenters* tadi, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2003 melalui buku panduannya berjudul "Penyelenggaraan Telecenter", mencoba membagi Telecenter itu ke dalam tiga jenis atau tingkatan, yaitu : 1) Telecenter dasar, 2) Telecenter masyarakat multiguna, dan 3) wartel.

Tujuan Telecenter dasar sangat terbatas. Ia biasanya ditempatkan secara terpusat di masyarakat marjinal/terpencil dan menawarkan kombinasi layanan termasuk telepon, faks, SMS, penghitungan, Internet dan fotokopi, serta teknologi terkait. Telecenter dasar dapat dimiliki secara pribadi oleh pengusaha atau berdasarkan pada perjanjian waralaba (*franchise*). Telecenter dasar dapat dijalankan sebagai usaha kecil yang menyediakan akses bayar pakai yang terbatas ke ICT untuk penduduk setempat. Telecenter dasar banyak terdapat di negara-negara seperti Chili (Amerika Latin) dan Afrika Selatan.

Telecenter Masyarakat Multiguna (Multi-purpose Community Telecenters/MCT) menyediakan lebih dari sekadar layanan akses sederhana ke ICT yang ditawarkan oleh Telecenter dasar. MCT memiliki teknologi yang lebih tinggi, mempekerjakan staf penuh waktu, fokus pada layanan-layanan khusus, dan melatih beragam pengguna di berbagai bidang, seperti *teckhnoenterpreneurhip*, kesehatan, pendidikan, usaha kecil, dan pemerintahan setempat.

Di banyak negara berkembang MCT menerima dukungan dari lembaga donor luar negeri atau donor internasional karena memerlukan investasi sosial dan keuangan yang cukup besar. Negara-negara seperti Uganda, Afrika Selatan, Ghana, Benin, dan Paraguay telah menerapkan MCT.

Walaupun seringkali tidak dianggap sebagai Telecenter, wartel juga dimasukkan ke dalam analisa ini karena wartel juga digunakan untuk memenuhi syarat-syarat akses dan layanan universal, karena wartel memberikan layanan telekomunikasi dasar kepada masyarakat yang kurang terlayani dan wartel juga dapat diperluas untuk mencakup layanan yang seringkali dikaitkan dengan Telecenter.

Wartel merupakan usaha mikro yang menyediakan akses ke layanan telepon untuk digunakan oleh masyarakat. Karena Wartel merupakan upaya mandiri tanpa subsidi, dengan kata lain tidak dapat mengabaikan keuntungan dalam usaha, maka di Indonesia tebaran Wartel belum benar-benar masuk desa, tetapi mengisi kantong-kantong masyarakat di perkotaan. Beberapa wartel juga telah mulai menawarkan layanan faks dan fotokopi. Biasanya, sebuah wartel dimiliki oleh seorang pengusaha swasta atau dioperasikan sebagai sebuah waralaba kepada penyedia layanan telekomunikasi nasional. Senegal, Afrika Selatan dan India merupakan negara pelopor dalam pembentukan wartel.

Dalam hal model kepemilikan, sejumlah *Telecenter* didanai dan dikendalikan oleh donor luar, instansi pemerintah, atau lembaga masyarakat nirlaba. *Telecenter* lain mungkin saja dilandasi oleh model-model kepemilikan setempat, seperti kepemilikan koperasi, waralaba, dan pendekatan-pendekatan usaha swasta lainnya.

Menurut asumsi para ahli, Telecenter mampu menciptakan “keterhubungan” (*interconnectedness*) antar perorangan dan antar kelompok masyarakat (komunitas), sehingga memungkinkan terlaksananya konsep kerjasama meskipun para pesertanya tersebar di mana saja (secara geografik), dalam semua kegiatan dan usaha manusia, termasuk belajar, bekerja dan bermain. Asumsi ini setidaknya tampak dari terus bertambahnya animo masyarakat untuk menggunakan internet itu. (lihat tabel 1).

**Tabel 1**  
**Peningkatan Jumlah Pelanggan dan Pengguna Internet di Indonesia**

TAHUN	PELANGGAN	PENGGUNA
1996	31000	110000
1997	75000	384000
1998	134000	512000
1999	256000	1000000
2000	760000	1900000
2001	1680000	4200000
2002	667.002	4.500.000
2003	865.706	8.080.534

2004	1.087.428	11.226.143
2005	1.500.000	16.000.000

(Sumber :[http://www.apjii .or.id](http://www.apjii.or.id))

## Metode Penelitian

### -Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif melalui metode observasi dan *depth interview*.

Subjek penelitian ini adalah para pengelola PLIK di kecamatan dari suatu wilayah yang terpilih secara purposive. Purposivitas ditentukan berdasarkan informasi mengenai aktivasi suatu PLIK. Sumber informasi mengacu pada nara sumber yang berasal dari para pengelola PLIK. Lokasi-lokasi PLIK yang terpilih secara purposive itu adalah sbb. :

**Tabel 2**  
**PLIK-PLIK Sampel**

Provinsi	Kabupaten	Ke-camatan	Alamat PLIK	Pengelola	Petugas Lapangan
Bengkulu	Rejang Lebong	Curup	Jl Panjaitan Gg Dharma bakti Rt 3 Rw.02	Herliando	Karman
		Bermani Ulu	Ds Sentral Baru	Juli Haryanto=udah mati gak lebih sebulan	Khairul/Mati Yang dicari 5-ketemu 1 PIK
	Bengkulu Kota	Muara Bangka Hulu	Jl WR Supratman No 13 Ds Kandang Limun Rt 006 Rw 001	Eti Murni	Hasyim Ali Imran
		Gading Cempaka	Jl. Merapi No.20 Rt.06 Rw.02	Budi Surahman	Eddy Sujadi : 5 PLIK-4 nya gak aktif 1 aktif. Ini karena barang yg diterima tidak sesuai dokumen; tidak terima peralatan sama sekali;
	Kepahiang	Kepahiang	SMK Negeri II Kepahiang	Helmi Johan	Taufik
		Merigi	Desa Mba Moy, Kec. Merigi	Debi Warsikin	Gunawan, Ada 6 PLIK, 5 sdh tidak berfungsi dan hanya 1 berfungsi. Tidak berfungsi karena tidak ada jaringan; tidak ada teknisi utk maintenance; pertama-tama

					fisiknya ada, rata2 setelah 2 bulan diambil kembali oleh suplier
Jambi	Batanghari	Muara Bulian	Jl MA Bulian, Kel Muara Bulian	Sarbayni	Felix Tawaang
		Pemayung	Jl. Jambi MA Bungo km 31, Desa Jembatan Mas	Hasbi Ansori	Dadi Sriwidadi
	Kota Jambi	Jambi Timur	Jl. Slamet Riyadi	M Syahlan	Bambang Sunarwan= ada 5 PLIK yg aktif 1 dan gak ada pengunjung-hanya aktif 1 bln; 2 barang gak ada pindah ke kabupaten lain; 2 : 1 pibdah alamat dan gak diketahui ; 1 gak ditemukan (gak dikenal)
		Jelutung	Rt 25 No.40 Jl. F Silaen	Suharno L	Murdaningsih Joko Waluyo
	Muaro Jambi	Maro Sebo	Rt 8, Kelurahan Jambi Kecil, Dusun Durian Rajo	Sariman AS	Idris
		Kumpeh	Desa Mekarsari Blok E, Dusun Puding	Suharudin	Dayat
	Babel	Belitung	Tanjung Pandan 1	Air Raya Timur 1 Rt.01 Rw.010	Kabul Gusmantoro
Tanjung Pandan 2			Jl Hasim Idris Rt 46 rw 019, desa pangkal lalang	Fistodia Qammeidio	Ari Cahyo Nugroho Elin Nurjanah
Kota Pangkal Pinang			Taman Sari	Jl.RE Martadinata No.30, Kelurahan Opas Indah	Cikmaisyahro
Bangka		Pangkal Balam	Jl. Tiram No.29 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Pasir Garam	Iman Zulkarnaen	Kautsarina
		Merawang	Jl. Raya Balun Ijuk, Desa Pagar Alam	Yuliza Eka Fitri	Neli
Sungai Liat		Perum Taman Pesona No.47	Anton Eko Saputro	Ari Sundari	

**-Subjek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Subjek penelitian ini, selain para penegelola itu sendiri, juga termasuk menyangkut PLIK itu sendiri dan situasi berlangsungnya pengelolaan layanan PLIK. Secara rinci maka subjek penelitian mencakup : 1) **Para pengelola PLIK ; 2)Eksistensi PLIK; 3)Situasi pengelolaan PLIK .**

Guna pengumpulan data dari ketiga subjek tersebut maka akan ditelusuri melalui teknik :-Para pengelola PLIK , melalui teknik deep interview =pedoman wwcr;-Eksistensi PLIK, melalui teknik observasi terstruktur=kuesioner; -Situasi pengelolaan PLIK, melalui teknik observasi terstruktur=kuesioner.

AD 1, menggunakan pedoman wawancara yang mengacu pada poin-poin : a. Lokasi keberadaan PLIK ?;b. Kelengkapan Hardware PLIK ?; c. Kelengkapan Software PLIK; d. Keberadaan

Fasilitas Utama Penunjang PLIK : kecepatan bandwidth; tenaga listrik ; voltase listrik.; e. Keberadaan proses akses PLIK (ketersediaan Informasi publik apa saja yang tersaji secara *offline* maupun *online*, *materi2 edukatif, ekonomi*); f. Unsur-unsur pendukung keorganisasian PLIK. (misalnya *technical support*, fungsinya jalan/tidak).

AD2, teknik observasi terstruktur melalui poin-poin : a. Lokasi keberadaan PLIK ?; b. Kelengkapan Hardware PLIK ?; c. Kelengkapan Software PLIK ?; d. Keberadaan Fasilitas Utama Penunjang PLIK ?; e. Keberadaan proses akses PLIK ?

AD3, menggunakan kuesioner terstruktur, mencakup poin-poin : a. Jam kedatangan pengunjung ?; b. Siapa yang mengunjungi ?; c. Berapa yang mengunjungi ?; d. Situs-situs apa yang diakses ?; e. Berapa lama mengakses ?; f. Apa Tujuan mengakses ?; g. Apa manfaat mengakses ?

#### **-Pengolahan dan Analisis Data**

Data AD1 diolah melalui kombinasi proses verbatim dan komputer dengan bantuan program SPSS. Data AD2 diolah melalui bantuan komputer dengan bantuan program SPSS. Data AD3 juga diolah melalui bantuan komputer dengan bantuan program SPSS. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bantuan teori-teori praktis menyangkut *telecenter theory*.

## **PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Eksistensi Telecenters dan Pengelola Telecenters**

Berdasarkan temuan terkait eksistensi *Telecenters* di masing-masing lokasi penelitian memperlihatkan bahwa di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Bengkulu kota, yakni di Kelurahan Gading Cempaka, maka dari lima sampel *Telecenters* yang diteliti ternyata empat *Telecenters* –nya itu ada namun tidak aktif, dalam artian PLIK itu hanya sebatas papan nama saja. Sementara hanya satu saja diantaranya yang benar-benar ada dan melakukan aktifitas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak sumber yang dipercaya, diketahui bahwa ketidakaktifan itu disebabkan oleh karena barang perlengkapan PLIK yang diterima tidak sesuai dokumen. Selain itu, juga karena pihak pengelola PLIK itu memang tidak menerima perlengkapan peralatan yang diperlukan PLIK sama sekali.

Itu di Bengkulu Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Gading Cempaka. Fenomena yang relatif sama tampaknya juga terjadi di daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ini misalnya di Kabupaten Rejang Lebong, Kelurahan Bermani Ulu. Di lokasi ini, dari lima PLIK yang dicari, ternyata hanya satu yang dapat dijumpai. Menurut penjelasan dari pengurus PLIK yang dapat ditemukan tersebut, keempat PLIK yang tidak ditemukan itu umumnya perangkat-perangkat PLIK-nya itu sudah pada diambil pihak-pihak tertentu. Sementara dari PLIK yang ditemukan itu sendiri, keberadaannya masih dalam kondisi standar. Standar dalam arti bahwa PLIK yang bersangkutan masih melakukan aktifitas. Menurut pengurusnya, sampai penelitian ini dilakukan, PLIK sudah jarang didatangi pengunjung sehubungan daya akses PLIK itu lemah (*bandwidth*-nya kecil).

Selanjutnya di Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Kepahiang Kota, berdasarkan temuan dijumpai ada enam PLIK. Namun demikian, diantaranya hanya satu PLIK yang masih berfungsi sebagai *telecenter*. Sementara Lima PLIK lagi tidak jelas keberadaannya. Ada yang pindah, ada yang tinggal papan nama, ada yang beralamat tapi sudah tidak ada aktifitas. Dengan demikian ada lima PLIK yang sudah tidak berfungsi. Disfungsionalisasi ini berkaitan dengan tidak adanya jaringan. Termasuk pula karena tidak adanya tenaga teknisi yang menyebabkan tidak adanya aktifitas *maintenance* terhadap perangkat PLIK.

Dari lima PLIK yang tidak berfungsi tadi, diperoleh keterangan bahwa pada awalnya secara fisik PLIK-PLIK itu memang ada. Akan tetapi, setelah dua bulan perangkat-perangkat itu diambil kembali oleh supplier.

Menyangkut di Provinsi Jambi, maka terkait di Kota Jambi dari lima PLIK sampel yang dicari ternyata hanya satu PLIK yang masih aktif, namun aktifitasnya itu hanya sampai satu bulan saja. Selama aktifitasnya itupun, diketahui tidak ada yang mengunjunginya. Sementara dua PLIK lainnya, dijumpai tidak memiliki perangkat-perangkat yang mendukung PLIK. Ketiadaan perangkat dimaksud sehubungan perangkat-perangkat tadi sudah dipindahkan ke kabupaten lain. Sedang dua PLIK lainnya, maka satu diantaranya tidak ditemukan di lokasi sesuai alamat dan satunya lagi sudah tidak ada sehubungan sudah dipindahkan ke alamat yang tidak diketahui.

Masih di Propinsi Jambi, maka untuk lokasi Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Muara Bulian, seharusnya terdapat tujuh PLIK. Namun dalam realita hanya dua yang dijumpai. Sementara lima PLIK lagi tidak jelas keberadaannya. Kemudian menyangkut dua PLIK yang dijumpai tadi, diketahui pula bahwa satu saja diantaranya yang aktif dan satunya lagi sudah tidak aktif. Ketidakaktifan ini sendiri dijelaskan sehubungan dengan sudah tidak lengkapnya peralatan yang menunjang operasional PLIK. Pihak Pemda Batang Hari sendiri mengakui tidak tahu-menahu mengenai eksistensi PLIK dimaksud.

Kemudian menyangkut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Belitung Barat (Tanjung Pandan), maka dari lima PLIK yang dicari tapi hanya satu PLIK yang ditemukan. Dari empat PLIK yang tidak ditemukan tadi, penyebabnya antara lain karena pindah alamat. Di samping itu, menurut informan juga karena tidak ada pengelola; barang tidak lengkap; tidak ada koneksi; dan tempat aksesnya jauh dari anggota masyarakat. Sementara dari satu PLIK yang ditemukan tadi, ternyata aktifitasnya hanya beroperasi satu bulan saja dan hal ini diantaranya disebabkan karena peralatan PLIK-nya sudah rusak. Selanjutnya mengenai rincian lengkap hasil penelitian observasi dan wawancara mendalam dengan informan menyangkut keberadaan sampel PLIK tadi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Pengelola PLIK Menurut Pendapatnya**  
**Tentang Keberadaan PLIK**

<b>Indikator Eksistensi PLIK</b>	<b>Temuan Penelitian</b>	<b>Catatan Penelitian</b>
Status Pengelolaan	Semuanya dikelola Pemilik	
Penempatan PLIK	Umumnya di rumah pribadi	
Jarak PLIK x Pemukiman Penduduk	umumnya < 1 Km dari pemukiman penduduk	
jumlah PC	antara 5-6 PC	
jumlah CPU	Antara 5-6	
Server	Umumnya dimiliki	
V-SAT	Umumnya sudah ada	
Router	Umumnya sudah ada	
Cabling	Tidak ada persoalan	
UPS	Umumnya tersedia	
Kondisi sarana PLIK	dalam kondisi bagus	Kecuali Server, V-SAT, dan Router di Bengkulu, tidak bagus.
tenaga listrik	Umumnya tersedia	
Voltase Listrik	Kebanyakan 900 watt - 1.300 watt	Masih ada juga yang 450 watt.
Kapasitas <i>bandwidth</i>	kebanyakan antara 256/kbps-516/kbps,	Ada juga yang mencapai 1/mbps
Sistem operasi PLIK	Microsoft dan Open Source.	
<u>internet browser</u>	-Bengkulu dan Jambi umumnya Mozilla Fire Fox - Babel : <i>Mozilla Fire Fox</i> dan ada <i>Google Chrome</i>	
<u>Pengaplikasian technopreneurship</u>	umumnya masih belum menerapkan	
konten edukasi	Bengkulu dan Jambi sebagian besar sudah menerapkannya dan sebagian kecil masih belum menerapkannya. Di Babel berimbang antara yang belum dan sudah menerapkan.	
<i>technical support</i>	Bengkulu, sudah didukung . Jambi dan Babel, tidak didukung	Meski sudah didukung <i>technical support</i> , tapi Belum berjalan sesuai fungsinya.

## 2. Situasi Pengelolaan PLIK

Dalam kaitan subyek situasi pengelolaan *telecenters* ini, penelitian ini mencoba mengungkap beberapa fenomena, diantaranya terkait dengan *telecenters* menurut status pengelolaannya, letak geografis *telecenters*, jarak *telecenters* dari pemukiman penduduk, hingga menyangkut faktor dukungan *technical support* dalam pengelolaan *telecenters*. Responden yang menjadi sumber data untuk riset ini sendiri terdiri dari masyarakat sekitar dan para pengguna *telecenters* itu sendiri. Hasil penelitiannya sebagai berikut :

Berkaitan dengan status pengelolaan *telecenters*, temuan penelitian menunjukkan bahwa *telecenters* itu dalam pengelolaannya, relatif berbeda pada masing-masing lokasi penelitian. Kalau di Babel *telecenters* semuanya dikelola oleh pemiliknya sendiri (4-100 %). Sementara jika di Jambi, menurut responden lebih banyak dikelola oleh operator (60 % = 3) dan 40 % (2) dikelola sendiri oleh pemilik *telecenters*.

Menurut para responden itu, dari segi letak geografis, penempatan lokasi *telecenters* itu umumnya di tempatkan di rumah pribadi. Ini terjadi baik di Babel, Jambi maupun di Bengkulu. Hampir semua responden pengelola mengatakan demikian (88.9 %-100.0). Hanya satu diantaranya yang mengatakan bahwa PLIK itu ditempatkan di sekolah, yaitu di lokasi Bengkulu.

*Telecenters* yang umumnya ditempatkan di rumah pribadi tadi, jika dilihat dari segi jaraknya dari pemukiman penduduk, menurut responden PLIK umumnya < 1 Km, walaupun ada juga yang mengatakan jaraknya itu > 1 - 2 Km. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lokasi PLIK sebenarnya masih dalam jangkauan normal anggota masyarakat.

Kemudian, dari segi jumlah PC yang tersedia di PLIK, menurut para pengelola itu cenderung saling berbeda pengakuannya. Jika di Babel, mereka lebih banyak mengaku jumlah PC itu sebanyak 5 buah. Hampir sama dengan di Babel, maka di Bengkulu juga lebih banyak diakui jumlahnya sebanyak 5 buah. Sementara di Jambi, menurut pengakuan pengguna, jumlah PC itu lebih banyak diakui sebanyak 6 buah PC.

Mengenai jumlah CPU yang tersedia di PLIK, menurut para responden tadi, kebanyakan diakui sebanyak 5 buah kalau di Babel (75.0%). Tapi jika di Jambi, lebih banyak diakui jumlahnya 6 buah (80%). Sementara di Bengkulu, jumlahnya lebih banyak diakui sebanyak 5 CPU (77.8%).

PLIK yang mereka kelola itu, umumnya diakui responden memiliki server yang mendukung maksimalnya fungsi internet. Namun demikian, ada juga di antara responden yang mengatakan bahwa PLIK yang aktif itu tidak memiliki server. Hal ini seperti sebagaimana diakui oleh 44.4 % (4) pengelola di Bengkulu.

Menyangkut perangkat V-SAT yang juga menunjang lancarnya fungsi PLIK, umumnya diakui ada oleh para pengelola PLIK. Namun paling banyak yang mengakui ada itu yaitu di Bengkulu. Sementara yang mengakui tidak ada V-SAT di PLIK itu, muncul di Babel, yakni diakui oleh 2 (50%) responden pengelola. (lihat tabel 7). Di samping umumnya PLIK sudah menyediakan V-SAT, maka menurut pengelola, PLIK yang dikelolanya itu umumnya juga sudah menyediakan *Switch* untuk operasionalisasi internet di PLIK. (lihat tabel 8).

Begitu juga dengan ketersediaan Router di PLIK, para pengelola umumnya juga mengakui bahwa Router itu memang eksis di PLIK yang mereka kelola. Meskipun begitu, memang masih dijumpai PLIK yang tidak ada Router-nya. (lihat tabel 9).

Demikian juga menyangkut persoalan perkabelan (*Cabling*) di PLIK, mereka umumnya juga mengatakan tidak ada persoalan menyangkut *Cabling* tersebut di PLIK yang mereka kelola. (lihat tabel 10).

Kemudian terkait dengan perangkat lainnya seperti UPS. Terkait perangkat tersebut, semua responden pengelola mengakui bahwa di PLIK yang mereka kelola itu sudah tersedia UPS. Ini berarti PLIK mereka kelola itu tidak rentan dengan kerusakan yang disebabkan oleh persoalan listrik mati karena dengan UPS persoalan ini dapat diatasi. (lihat tabel 11).

Kemudian terkait dengan perangkat lainnya seperti UPS. Terkait perangkat tersebut, semua responden pengelola mengakui bahwa di PLIK yang mereka kelola itu sudah tersedia UPS. Ini berarti PLIK mereka kelola itu tidak rentan dengan kerusakan yang disebabkan oleh persoalan listrik mati karena dengan UPS persoalan ini dapat diatasi. (lihat tabel 11).

Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba mengetahui pendapat para pengelola PLIK tadi menyangkut kondisi sarana PLIK sebelumnya. Hasil penelitiannya disajikan dalam tabel 12 berikut. Berdasarkan tabel dimaksud, maka menurut para pengelola di Babel dan Jambi, sarana

PLIK itu umumnya dinilai dalam kondisi bagus. Sementara menurut responden di Bengkulu, maka selain sarana seperti Server, V-SAT, dan Router, yang nota bene banyak diakui tidak bagus (67 %-89 %), kebanyakan dinilai bagus oleh responden. (lihat tabel 12).

**Tabel 4**  
**Responden menurut pendapatnya tentang kondisi sarana PLIK**

Lokasi Penelitian	Sarana PLIK	Kondisi				Total	
		Bagus		Tidak bagus			
		f	%	f	%	f	%
Provinsi Babel	PC	4	100.0	-	-	4	100.0
	CPU	4	100.0	-	-	4	100.0
	Server	3	75.0	1	25.0	4	100.0
	V-SAT	-	-	4	100.0	4	100.0
	Switch	4	100.0	-	-	4	100.0
	Router	4	100.0	-	-	4	100.0
	Cabling	4	100.0	-	-	4	100.0
	UPS	2	50.0	2	50.0	4	100.0
Provinsi Jambi	PC	4	80.0	1	20.0	5	100.0
	CPU	4	80.0	1	20.0	5	100.0
	Server	4	80.0	1	20.0	5	100.0
	V-SAT	4	80.0	1	20.0	5	100.0
	Switch	4	80.0	1	20.0	5	100.0
	Router	3	75.0	1	25.0	4	100.0
	Cabling	5	100.0	-	-	5	100.0
	UPS	4	80.0	1	20.0	5	100.0
Provinsi Bengkulu	PC	5	55.6	4	44.4	9	100.0
	CPU	5	55.6	4	44.4	9	100.0
	Server	3	33.3	6	66.7	9	100.0
	V-SAT	1	11.1	8	88.9	9	100.0
	Switch	5	55.6	4	44.4	9	100.0
	Router	1	20.0	4	80.0	5	100.0
	Cabling	5	55.6	4	44.4	9	100.0
	UPS	5	55.6	4	44.4	9	100.0

Sementara mengenai ketersediaan tenaga listrik sebagai sarana penunjang utama bagi beroperasionalnya PLIK, menurut semua responden sudah ada (tersedia) di PLIK itu. (Lihat tabel 13).

Besaran voltase listrik sebagai sarana penunjang utama PLIK itu, merentang antara 450 watt hingga > 2.200 watt. Namun kebanyakan voltasenya berkisar 900 watt hingga 1.300 watt. Namun masih ada juga yang beroperasi dengan voltase sebesar 450 watt. (lihat tabel 14).

Kapasitas *bandwitch* yang dimiliki oleh PLIK, kebanyakan PLIK kapasitas *bandwitch* – nya antara 256/kbps-516/kbps, meskipun ada juga yang mencapai kapasitas 1/mbps. (lihat tabel 15). Dengan kapasitas *bandwitch* yang demikian, PLIK diketahui beroperasi pada system operasi Microsoft dan Open Source. Menurut pengakuan bagian terbesar responden (60.0 %) di Jambi, sistem yang diaplikasikan itu adalah Open Source. Sistem ini ternyata diakui oleh semua responden (9= 100%) di Bengkulu, sebagai sistem operasi yang diaplikasikan pada PLIK yang mereka kelola. Sementara sistem operasi Microsoft dioperasikan sebagian di Babel dan sebagian di Jambi (lihat tabel 16).

Menyangkut ragam internet browser yang diinstal di PLIK, maka di Bengkulu dan Jambi umumnya diakui menggunakan Mozilla Fire Fox. Sementara di Babel menerapkan *Mozilla Fire Fox* dan ada yang menerapkan *Google Chrome*. Mengenai *internet browser* yang diinstal di PLIK, menurut responden, mereka mengaplikasikan dua jenis *internet browser*, yaitu *Mozilla Fire Fox*

dan *Google Chrome*. Di Bengkulu hampir semuanya menggunakan *Mozilla Fire Fox* dan begitupun di Jambi, semuanya mengaplikasikan *Mozilla Fire Fox*. Sementara di Babel ada dua yaitu *Mozilla Fire Fox* dan *Google Chrome*. (lihat tabel 17).

Terkait dengan arahan pemerintah agar pengelola PLIK menerapkan perangkat lunak menyangkut *technopreunership* di PLIK agar masyarakat bisa lebih akrab dengan dunia kepengusahaan (*enterpreneur*), ternyata para pengelola pada umumnya masih belum menerapkan perangkat lunak *Technopreunership* dimaksud. (lihat table 18).

Menyangkut perangkat lunak tentang konten edukasi, maka penerapannya di masing-masing lokasi relatif berbeda. Kalau di Bengkulu dan Jambi sebagian besar sudah menerapkannya dan sebagian kecil masih belum menerapkannya, maka di Babel penerapannya tampak berimbang, yakni sama antara yang belum dan sudah menerapkan. (lihat tabel 19).

Kemudian terkait dengan persoalan dukungan *technical support* dalam pengelolaan PLIK, menurut bagian terbesar responden di Jambi (60.0%), PLIK yang mereka kelola itu tidak didukung oleh *Technical Support*. Begitu juga di Babel, sebagian besar juga menyatakan PLIK yang mereka kelola itu tidak didukung *technical support*. Sementara di Bengkulu, bagian terbesar respondennya menyatakan bahwa PLIK yang mereka kelola itu sudah didukung *technical support*. (lihat tabel 20). Dari responden yang menyatakan bahwa PLIK mereka itu sudah didukung *Technical Support*, ternyata Fungsi *Technical Support* itu diakui oleh sebagian besar responden tidak berjalan sesuai fungsi. (lihat tabel 21).

### Diskusi

Telecentres pertama sendiri didirikan di Velmdalen, Swedia pada awal hingga pertengahan 1980-an. Meskipun telecentres hampir ada di setiap negara, namun demikian umumnya tampil dengan nama-nama yang berbeda. Ada yang menyebut : *public Internet access center (PIAP)*, *village knowledge center*, *Infocenter*, *community technology center (CTC)*, *community multimedia center (CMC)*, *multipurpose community Telecentre (MCT)*, *Common/Citizen Service Centre (CSC)*, *school-based Telecentre*, etc. Di Indonesia sendiri telecenters dikenal melalui sejumlah nama, diantaranya adalah *Community Acces Point (CAP)*; *Balai Informasi Masyarakat (BIM)*, *Warung Informasi Teknologi (Warintek)*. Lalu dikenal juga dengan nama baru, seiring pengembangannya oleh pemerintah. Untuk pengembangan program telecenters terbaru itu, maka dikenal dengan istilah *Pusat Layanan Internet Keamatan (PLIK)* dan *Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)*.

Berkaitan dengan variasi *telecenters* tadi, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2003 melalui buku panduannya berjudul "Penyelenggaraan Telecenter", membagi Telecenter itu ke dalam tiga jenis atau tingkatan, yaitu : 1) Telecenter dasar, 2) Telecenter masyarakat multiguna, dan 3) wartel.

Terkait dengan penelitian ini yang mempertanyakan eksistensi *telecenters* di Provinsi Bengkulu, Jambi serta Bangka Belitung, temuannya mengindikasikan bahwa telecenters- telecenters itu umumnya tidak beroperasi sesuai dengan tujuan pengadaan program telecenters melalui bentuk PLIK. Penyebab tidak beroperasinya telecenters dimaksud umumnya karena perangkat-perangkat yang mendukung bagi beroperasinya PLIK itu sudah tidak tersedia. Dengan fenomena ini, maka hakekat dari pelaksanaan Telecentres sebagaimana pembentukannya pertama kali di Velmdalen, Swedia itu (Hedberg, 2015)., dengan sendirinya tidak mungkin terwujud.

Selanjutnya, terkait dengan PLIK-PLIK yang dijumpai masih eksis beroperasi, maka mengacu pada teori telecenters, berdasarkan indikator yang ada maka dapat dikatakan bahwa PLIK-PLIK dimaksud umumnya termasuk dalam kategori *telecenters* yang berbasis pada model dasar sehubungan banyaknya keterbatasan dalam penyelenggaraan *teelecenter* itu. Diantaranya seperti tidak didukung oleh *Technical Support*.; tidak adanya aktifitas pelatihan bagi pengguna, hampir tidak adanya aplikasi-aplikasi khusus yang dituntut secara ideal dalam program *telecenters*<sup>1</sup> Dengan demikian, mengacu pada catatan APJII, ini berarti sama fenomenanya dengan yang terjadi di negara-negara seperti Chili (Amerika Latin) dan Afrika Selatan, di mana *telecenters* model dasar juga memang banyak dijumpai di sana.

Beberapa PLIK seperti di Kabupaten Kepahiang dan Curup, dijumpai PLIK yang berganti model, dari *telecenters* bermodel dasar menjadi model wartel. Indikator model wartel ini berupa faktor

<sup>1</sup> Hanya ada satu aplikasi khusus, yaitu *e-education*-itupun lokasinya tidak ditempatkan secara terpusat di masyarakat marjinal/terpencil-melainkan di sekolah).

perubahan kepemilikan, yakni telecenter model dasar menjadi dimiliki secara pribadi. Selain itu, adanya pembayaran bagi anggota masyarakat yang mengakses wartel itu.

Temuan lainnya memperlihatkan bahwa dari sejumlah PLIK yang beroperasi tadi, sesuai dengan indikator telecenters, maka tidak satupun di antara telecenters itu yang termasuk kategori *telecenters* model *Multi-purpose Community Telecenters-MCT*. Hal ini merujuk pada sejumlah indikator yang antara lain berupa tidak adanya staf yang bekerja penuh waktu; tidak adanya dukungan *Technical Support*; tiadanya pelatihan para pengguna seperti di bidang *teckhnoenterpreneurhip*, kesehatan, pendidikan, atau usaha kecil. Dengan demikian, telecenter yang beroperasi itu menjadi sulit mencapai tujuan ideal dari telecenter itu sendiri sebagaimana tujuan awal pembentukannya di Swedia tadi, yaitu untuk menanggapi kebutuhan telekomunikasi masyarakat ; untuk merespon kebutuhan pelatihan keterampilan/IT ; untuk menanggapi permintaan untuk akses Internet ; untuk menginspirasi pertumbuhan bisnis TI baru ; untuk menghasilkan peluang pendapatan ; untuk mengembangkan pasar untuk produk informasi dan layanan ; untuk menyediakan lokasi untuk *Telework /telecommuting* ; untuk memberikan lokasi untuk pengiriman terpusat pelayanan pemerintah; dan untuk mencapai segmen terlayani penduduk (Hedberg, 2015).

Secara terminologi, *telecenters* yang ideal bagi pencapaian hakikat tujuannya itu adalah *telecenters* yang beroperasi dalam model *Multi-purpose Community Telecenters-MCT*. Guna mencapai model ideal dimaksud, maka di samping mengatasi kekurangan-kekurangan teknis tadi, kitranya perlu juga meningkatkan kualitas sumber daya penegelolanya. Terkait dengan ini maka mutu layanan pada masyarakat perlu ditingkatkan semisal membuat layanan yang relevan untuk masyarakat (*demand-driven*) yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari komunitas masyarakat desa perlu digali melalui proses infomobilisasi. Infomobilisasi dilakukan oleh tenaga fasilitator (semacam pendamping) untuk ”merekatkan” antara kegiatan masyarakat desa dengan akses infokom dalam telecenter.

Selain itu, pembangunan telecenter berikut-berikutnya hendaknya bukan lagi sekedar proyek percontohan melainkan harus bersifat kebijakan nasional. Telecenter-telecenter yang eksi bergabung dalam satu jejaring *telecenter (Indonesia Telecenter Network)* yang menghubungkan tidak hanya pengelolanya, namun juga warga, relawan, penyedia layanan dan program *serta stakeholder* lainnya.

Jejaring ini juga mempunyai jejaring pendukung (*Telecenter Support Network*) yang memfasilitasi upaya nasional dari berbagai *stakeholder* untuk menyediakan konten, layanan, program, teknologi, pelatihan, konsultasi, kemitraan dan pendanaan bagi kegiatan *telecenter*. Jaringan pendukung ini secara khusus juga memiliki jaringan peningkatan kapasitas pekerja telecenter (*Telecenter Network Academy*) dalam bentuk pelatihan, lokakarya, konferensi, ‘*telecenter leadership forum*’,  
sertifikasi  
dll.

Dalam menyiapkan akses internet dan komunikasi dalam Telecenter seharusnya juga tidak membutuhkan membangun secara fisik dari awal. Telecenter nantinya bisa memanfaatkan adanya jaringan akses komunikasi yang sudah ada saat ini seperti Jejaring Pendidikan Nasional ([www.jardiknas.org](http://www.jardiknas.org)) dan Warung Internet ([www.awari.or.id](http://www.awari.or.id) dan <http://www.apwkomitel.org>).

Antara Jardiknas dan Warnet, jika dijumlahkan keduanya ada lebih dari 20 ribu titik di seluruh pelosok Indonesia. Kedua bentuk akses tersebut sangat berpotensi untuk menjadi *telecenter*, yakni *telecenter* berbasis sekolah (*School-Based Telecenter = SBT*) dan *telecenter* berbasis model wartel (*Warnet-Based Telecenter-WBT*). Kedua bentuk ini sudah diimplementasikan di banyak negara. (Surtikanti, 2008. <https://maryatisurtikanti.wordpress.com>. Accessed, 10 November 2015).

## PENUTUP

Penelitian ini pada dasarnya mempertanyakan eksistensi *telecenters* di Provinsi Bengkulu, Jambi serta Bangka Belitung. Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa telecenters yang dalam kenyataan disebut PLIK itu ternyata mengindikasikan bahwa telecenters-telecenters itu umumnya tidak beroperasi sesuai dengan tujuan pengadaan program telecenters melalui bentuk PLIK. Penyebab tidak beroperasinya telecenters dimaksud umumnya karena perangkat-perangkat yang mendukung bagi beroperasinya PLIK itu sudah tidak tersedia. Dengan fenomena ini, maka hakekat dari pelaksanaan Telecentres sebagaimana pembentukannya pertama kali di Velmdalen, Swedia itu dengan sendirinya jadi tidak mungkin terwujud.

Selanjutnya, terkait dengan PLIK-PLIK yang dijumpai masih eksis beroperasi, maka mengacu pada teori telecenters, berdasarkan indikator yang ada maka dapat dikatakan bahwa PLIK-PLIK dimaksud umumnya termasuk dalam kategori *telecenters* yang berbasis pada model dasar

sehubungan banyaknya keterbatasan dalam penyelenggaraan *telecenter* itu. Diantaranya seperti tidak didukung oleh *Technical Support*.; tidak adanya aktifitas pelatihan bagi pengguna, hampir tidak adanya aplikasi-aplikasi khusus yang dituntut secara ideal dalam program *telecenters*. Dengan demikian, mengacu pada catatan APJII, ini berarti sama fenomenanya dengan yang terjadi di negara-negara seperti Chili (Amerika Latin) dan Afrika Selatan, di mana *telecenters* model dasar juga memang banyak dijumpai di sana.

Beberapa PLIK seperti di Kabupaten Kepahiang dan Curup, dijumpai PLIK yang berganti model, dari *telecenters* bermodel dasar menjadi model wartel. Indikator model wartel ini berupa faktor perubahan kepemilikan, yakni telecenter model dasar menjadi dimiliki secara pribadi. Selain itu, adanya pembayaran bagi anggota masyarakat yang mengakses wartel itu.

Temuan lainnya memperlihatkan bahwa dari sejumlah PLIK yang beroperasi tadi, sesuai dengan indikator telecenters, maka tidak satupun di antara telecenters itu yang termasuk kategori *telecenters* model *Multi-purpose Community Telecenters-MCT*. Dengan demikian, telecenter yang beroperasi itu menjadi sulit mencapai tujuan ideal dari telecenter itu sendiri sebagaimana tujuan awal pembentukannya di Swedia tadi.

Secara terminologi, *telecenters* yang ideal bagi pencapaian hakikat tujuannya itu adalah *telecenters* yang beroperasi dalam model *Multi-purpose Community Telecenters-MCT*. Guna mencapai model ideal dimaksud, maka di samping mengatasi kekurangan-kekurangan teknis tadi, kiranya perlu juga meningkatkan kualitas sumber daya penegelolanya. Terkait dengan ini maka mutu layanan pada masyarakat perlu ditingkatkan semisal membuat layanan yang relevan untuk masyarakat (*demand-driven*) yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari komunitas masyarakat desa perlu digali melalui proses infomobilisasi.

Selain itu, pembangunan telecenter berikut-berikutnya hendaknya bukan lagi sekedar proyek percontohan melainkan harus bersifat kebijakan nasional. Telecenter-telecenter yang eksi bergabung dalam satu jejaring *telecenter* (*Indonesia Telecenter Network*) yang menghubungkan tidak hanya pengelolanya, namun juga warga, relawan, penyedia layanan dan program serta *stakeholder* lainnya.

Jejaring ini juga mempunyai jejaring pendukung (*Telecenter Support Network*) yang memfasilitasi upaya nasional dari berbagai *stakeholder* untuk menyediakan konten, layanan, program, teknologi, pelatihan, konsultasi, kemitraan dan pendanaan bagi kegiatan *telecenter*. Jaringan pendukung ini secara khusus juga memiliki jaringan peningkatan kapasitas pekerja telecenter (*Telecenter Network Academy*) dalam bentuk pelatihan, lokakarya, konferensi, '*telecenter leadership forum*', sertifikasi dll.

Dalam menyiapkan akses internet dan komunikasi dalam Telecenter seharusnya juga tidak membutuhkan pembangunan secara fisik dari awal. Telecenter nantinya bisa memanfaatkan adanya jaringan akses komunikasi yang sudah ada saat ini seperti Jejaring Pendidikan Nasional ([www.jardiknas.org](http://www.jardiknas.org)) dan Warung Internet ([www.awari.or.id](http://www.awari.or.id) dan <http://www.apwkomitel.org>).

**Ucapan Terima kasih :** Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, khususnya tim litkayasa BPPKI Jakarta yang telah banyak membantu bagi terkumpulnya data penelitian ini. Terlebih khusus lagi bagi Bapak Hasyim Ali Imran yang banyak meluangkan waktunya bagi penulis guna pembimbingan teknis dan substantif penulisan artikel tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pahala yang setimpal bagi semua pihak dimaksud.

### Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2003. "Penyelenggaraan Telecenter". (Diakses Juli 2-15).
- Ariyanti, Sri (2010). Studi Pemanfaatan fasilitas Universal Service Obligation (USO) di Purwakarta-Jawa Barat. Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 8 No.2. Juni 2010.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. Olahan berdasarkan Permen 145/2007 tentang WPUT Buletin Pos dan Telekomunikasi. 2010. Vol. 8 No.1. Maret 2010. Jakarta : Kemkominfo.
- Hedberg, Linda Johansson. 2015. "TELECENTRE FOR COMMUNITY DEVELOPMENT, Evaluation of the Tunjang Telecentre, Malaysia", dalam <http://cijournal.net/index.php/ciej/article/view/412/601>, (diakses : 06112015)
- Indotelkom. 2015. "Proyek-Plik-Kian-Pelik.". <http://www.indotelko.com/2011/11/> (diakses.5 November).
- Kumar, Rajendra dan Best, Michael . 2015. "*Social Impact and Diffusion of Telecenter Use: A Study from the Sustainable Access in Rural India Project*". Taken from International Development Group, Department of Urban Studies and Planning , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
- Mayanja, Meddie , Acevedo, Manuel, Caicedo, Silvia and Buré, Claire. "A collaborative project of the telecentre.org community". Dalam *A Guidebook for Managing Telecentre Networks*, <https://en.wikibooks.org>, accessed, 6 nov 2015.
- Surtikanti, Maryati . 2008. "Sukses membangun telecenter ". Dalam <https://maryatisurtikanti.wordpress.com>, accessed, 6 nov 2015.